

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN
ORGANISASI EKSTRA KAMPUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT UNITRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

MIRDAN IDHAM

2016110148

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGUNAAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN
ORGANISASI EKSTRA KAMPUS
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT
UNITRI**

Mirdan Idham¹ Hendrik Suhendri² Willy Tri Hardianto³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Email: Mirdanidham01@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini diarahkan untuk memutuskan dan merinci Tanggung Jawab dan Kejelasan Penggunaan Aset Fungsional Untuk Latihan Kewibawaan Di Luar HMI Komisariat Unitri. Masalah dalam penelitian ini ialah cara yang paling umum untuk melaksanakan Tanggung Jawab dan Keterusterangan dalam Pemanfaatan Aset Fungsional untuk Latihan Hirarki Extra Grounds dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat. Alasan penelitian ini ialah untuk memutuskan pelaksanaan Organisasi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unitri.

Pada riset berikut memakai penelitian kualitatif deskriptif. Memakai 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder riset berikut memakai 3 alat mengumpulkan data yang dilakukan yaitu observasi, mewawancarai dan mendokumentasikan. Untuk menganalisa data yang menggunakan melakukan identifikasi dan menganalisa data, lalu dikelola dan menganalisis yang mempunyai relasi dan perbandingan antara teori yang sama dengan pokok problematika.

Berdasarkan hasil riset memaparkan bahwasannya dalam penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unitri cukup baik, namun terdapat beberapa unsur sistem informasi akuntansi pendapatan yang masih kurang lengkap dan proses pengolahannya masih dengan sistem manual.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan moneter sudah sebagai kebutuhan penduduk dan sudah memperoleh perhatian dari otoritas publik Indonesia. Semenjak dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 terkait Uang Negara (UU17/2003), Indonesia secara resmi telah mengabdikan diri untuk mengawasi dana dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip administrasi yang baik, khususnya keterusterangan, tanggung jawab, dukungan dan konsistensi. Kewajiban badan publik untuk membantu pelaksanaan keterusterangan bahkan telah diakui melalui perintah Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Data Publik (UU14/2008). Berbagai pedoman pelaksanaan di tingkat pelayanan dan pemerintah di sekitarnya telah mengarahkan bagaimana pelaksanaan UU14/2008.

Terlepas dari kenyataan bahwa tanggung jawab dan pengaturan hukum telah ditetapkan untuk mengarahkan keterusterangan moneter, masih ada banyak masalah dalam pelaksanaan di lapangan. Pasti banyak yang bertanya-tanya mengapa dana yang dikelola oleh yayasan publik harus lugas atau terbuka? Ada beberapa klarifikasi yang dapat menjelaskan mengapa keterusterangan moneter dari yayasan publik begitu penting:

Untuk mulai dengan, untuk meningkatkan kepercayaan. Administrasi yang dikelola negara yang terbuka untuk penyampaian data moneter terhadap publik umum sangat mempercayai daripada legislatif yang cukup tertutup. Medina dan Rufin (2015) memahami hal itu *"straightforwardness significantly affects*

trust and a roundabout impact that is interceded by fulfillment." Negara-negara bagian yang tertutup pada data moneter bisa memutuskan pada penduduk upaya mempunyai banyak wawasan istimewa terkait menyeleweng moneter. Otoritas publik yang menutup data moneter dapat dikaitkan dengan kecanggungan untuk pengawasan dan mengumumkan dana. Umumnya, keadaan tertutup tidak bisa memahami mengapa eksekusi kemajuan mereka buruk dan tidak efektif.

Kedua, agar supaya bisa berkembang terkait mengelola pada bagian lokal (pengendalian). Sebagai pembuatan melaksanakan memperbaiki wilayah lokal layak, berguna sebagai pengingat agar bisa diawasi, dan mengelola wilayah lokal ini akan berhasil dengan asumsi individu daerah mendapatkan data terkait pendanaan proyek/latihan. Penduduk menjadi meningkatkan tempat disaat otoritas pemerintah belum ada. Otoritas publik mempunyai pembatas untuk pengaturan proyek dan training, dan sebagai itulah pentingnya donasi dari orang setempat. Masyarakat dapat memberikan evaluasi dan berkontribusi terkait kurangnya atau kecuai yang ada perbedaan untuk melakukan proyek/training dengan mengasumsikan kebijakan dengan langsung pada menyampaikan data keuangan ketika program/training.

Ketiga, bahwasannya masyarakat mempunyai hak istimewa agar bisa memperoleh data dan memilih supaya tahu (*right to illuminate dan right to be aware*). Pasal 14 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 terkait Kebebasan Dasar menyatakan “ personalia memiliki hak istimewa sebagai pemberi dan mendapatkan data yang diinginkan bisa memelihara dirinya sendiri dan iklim sosial”. Keistimewaan penduduk ialah kekhawatiran dan proporsi sifat sistem

berbasis suara di setiap negara. Warga memiliki pilihan untuk mendapatkan data dan mengetahui strategi, proyek, dan latihan pemerintah yang secara langsung atau implisit mempengaruhi keberadaan warga dan masyarakat. Dana yang disalurkan oleh otoritas publik juga harus dididik secara lugas (*straightforwardly*) sehingga warga dapat mengevaluasi kecukupan atau tidak adanya aset untuk mendukung strategi, proyek dan latihan.

Keterbukaan moneter pertama kali dirujuk dalam Peraturan 17 Tahun 2003 terkait Uang Negara (UU17/2003). Pada pemaparan PP 17/2003 menyebutkan bahwasannya diantara mengupayakan substansial Sebagai mengakui kelugasan dan akuntabilitas pada menyelenggarakan keuangan negara ialah penyusunan pelaporan akuntabilitas keuangan pemerintah yang sudah terpenuhi standar tepat waktu dan siap sedianya. bagian mengakui prinsip-prinsip pembukuan pemerintah.

Makna keterusterangan tersebut terdapat dalam Pedoman Badan Publik yang mengatur terkait Pokok-pokok Pembukuan Pemerintah, khususnya Undang-undang Tidak Resmi Nomor 24 Tahun 2004 (PP24/2004) yang telah digantikan melalui PP71/2010. Dalam dua pedoman ini, batas keterusterangan ditemukan. Memperoleh keuangan yang terbuka untuk masyarakat sebagai penguat pemikiran bahwa publik mempunyai pemilihan sebagai untuk tahu dengan langsung dan melengkapi kewajiban otoritas publik dalam menangani aset yang dibagikan dengannya dan konsistensinya dengan peraturan dan pedoman.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam suatu proses pengelolaan yang melibatkan instansi sangat membutuhkan keterbukaan pengelolaan keuangan atau

transparansi keuangan, hal ini juga berlaku dalam semua organisasi tidak terkecuali Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Himpunan Mahasiswa Islam ialah diantara organisasi Mahasiswa Islam diantara berbagai organisasi Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947 M bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 H yang diprakarsai oleh Dr. Lafran pane dan 14 Mahasiswa lainnya. sebagai Organisasi yang berdiri dua tahun pasca kemerdekaan, HMI pada saat itu mengalami banyak sekali tantangan baik dalam dunia kampus maupun yang bersentuhan dengan kebijakan pemerintah, hal ini membuat HMI secara Organisatoris harus mampu bertahan dengan semua dinamika yang terjadi di awal kemerdekaan dengan inisiasi memperluas dan memperbanyak anggota dalam tubuh internal organisasi yang mana ditandai dengan terbentuknya beberapa cabang HMI seperti Cabang Yogyakarta, Solo, Klaten dan Malang pada kongres Pertama HMI di Yogyakarta Tanggal 30 November 1947.

Seiring berjalannya waktu Himpunan Mahasiswa Islam mulai berkembang bukan saja pada tingkat Cabang namun pada tingkat Badan Koordinasi (BADKO), Koordinator Komisariat (KORKOM) sampai pada tingkat Komisariat. Secara umum Himpunan Mahasiswa Islam berfungsi sebagai organisasi perkaderan sudah barang tentu memiliki rangkaian kegiatan sebagai upaya pengelolaan sumber daya manusia. Dalam menjalankan aktivitas organisasi tidak bisa dipungkiri bahwa efektivitas kegiatan operasional organisasi tidak hanya berada pada kapasitas sumber daya manusianya namun lebih dari pada itu proses pengelolaan keuangan organisasi juga ialah satu variabel yang harus

diperhitungkan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Unitri ialah diantara Komisariat yang ada di Cabang Malang dari 74 Komisariat lainnya, di dalam Instansi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Himpunan Mahasiswa Islam terbagi menjadi dua Komisariat diantaranya Komisariat Unitri (KOMUNI) dan Komisariat Insan Cita (IC) dengan kategori *basic* kaderisasi yang berbeda yang mana secara administrasi organisasi Komisariat Unitri menaungi Mahasiswa Islam yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pendidikan sedangkan pada Komisariat Insan Cita menaungi Fakultas Pertanian, Ilmu Kesehatan, Peternakan dan Teknik. Dalam menjaga keberlangsungan proses kaderisasi yang dikemas dalam bentuk kegiatan Komisariat maka sangat diperlukannya penunjang dalam hal ini persoalan finansial Organisasi, hal yang berkaitan dengan finansial Organisasi harus benar-benar dikelola dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi untuk menjaga kestabilan operasional kegiatan dalam Organisasi.

Melalui pemaparan yang sudah diuraikan diatas, sehingga timbulah judul sebagai riset ialah **“Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Organisasi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unitri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dilatar belakang pemaparan diatas sehingga diambil perumusan permasalahan ialah :

Bagaimana pengaplikasian Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Organisasi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unitri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset berikut tiada lain sebagai berikut :

Sebagai pengetahuan penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Organisasi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unitri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil riset berikut, harapannya akan berkontribusi pada pihak-pihak terkait seperti :

1. Bagi Peneliti

Harapannya bisa berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman penulis terkait Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Organisasi Ekstra Kampus serta sebagai terpenuhinya sebuah persyaratan menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

2. Bagi Instansi (HMI Komisariat Unitri)

Hasil riset berikut harapannya bisa menjadikan kritik yang membangun dan informasi penambah yang bisa sebagai permulaan mempertimbangkan untuk manajemen operasional kegiatan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Harapannya bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bahan acuan (referensi) guna mengkaji topik-topik yang sama yang selaras Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Operasional Kegiatan Organisasi Ekstra Kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alfasadun, dkk 2018. Jurnal : *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank.
- Rennyowijoyo, Muindoro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Setiawan dkk. 2017. Jurnal : *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)*. (Online).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008).
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Gelinas, Ulrich & Dull, B Richard. 2012. *Accounting Information Systems*. Boston: PwsKent Publishing Company.
- Herlin, dkk. 2018. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan (Studi Kasus Pada PT. Maxindo Karya Selaras Bengkulu)*, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indarati Dian. 2018. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Laboratorium Klinik "Ultra Medica" Tulungagung*. Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kartikahadi Hans, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta : Salemba.

- Muhammad. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lau, Peter dan Nelson, Lam. 2014. *Akuntansi Keuangan (Intermediate Financial Reporting) : Perspektif Ifrs* Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Resika Aditama.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Murtani, Dwi. Dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (ed. 2, buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Purba Novianty Wiwin. 2017. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Pendapatan* Pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan.
- Riahi. 2011. *Accounting theory*. Belkaoui, Buku jilid 2. Salemba Empat.
- Riahi, Ahmed. 2011. *Accounting theory*. Belkaoui, Buku jilid 2. Salemba Empat.
- Sodikin dan Riyono. 2014. *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Mnajemen YKPN.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA).
- Konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam Kongres Ke-XXXI Tahun 2021. Terkait Pedoman Kepengurusan HMI Komisariat.
- Konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam Kongres Ke-XXXI Tahun 2021. Terkait Pedoman Pengelolaan Dana Oprasional HMI Komisariat.